

	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit										
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	Belum terfasilitasinya kebutuhan rehab rumah masyarakat yang terkena bencana	Melakukan perbaikan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana	44.960.050	Kepala Bidang Perumahan Permukiman						
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	Belum terfasilitasinya kebutuhan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	59.999.950	Kepala Bidang Perumahan Permukiman						
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen										
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	Masih adanya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap Rumah Layak huni	Pemanfaatan hunian rusunawa untuk masyarakat yang membutuhkan	457.593.736	Kepala Bidang Perumahan Permukiman						
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	85%	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup									
	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%										
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen										
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 dokumen	Diperlukannya penyediaan dokumen KLHS RPJMD sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.	Penyusunan dan penetapan dokumen KLHS RPJMD	122.623.600	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup						
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	diperlukannya penyediaan dokumen KLHS RDTR untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program pada dokumen RDTR	Penyusunan KLHS RDTR	144.841.000	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup						
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%										
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis										
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup	Koordinasi dengan Kabupaten perbatasan dan pemerintah Propinsi Sumbar	16.010.100	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran						

[illegible]

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	Belum Optimalnya Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) yang mengintegrasikan aspek-aspek Prilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH)	Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) menuju penghargaan Adiwiyata	93.362.600	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup					
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%									
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 dokumen									
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen	pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup	menerima, memverifikasi, menganalisis dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup	11.103.350	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup					
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	adanya potensi sengketa lingkungan hidup akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang harus diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan	memfasilitasi dan mediasi sengketa lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang	8.619.950	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup					
Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98%									
Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	80%									
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah	Belum Maksimalnya peran Kelompok Masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Sampah	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi kelompok masyarakat	40.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran					
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	Belum terdokumentasikan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi serta mendokumentasikannya	9.150.000	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran					
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA	Melakukan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA	6.508.403.081	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran					
Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	Perlu nya operasional penanganan sampah	Pemenuhan Sarana dan Prasarana penanganan sampah dan pembayaran gaji petugas kebersihan	5.807.179.590	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran					

3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80%	Belum terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni									
	Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase permukiman layak huni	96,62%										
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 unit										
	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di	120 Unit	Masih adanya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap Rumah Layak huni yang berada di dalam dan di luar pada kawasan kumuh	Perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah	2.561.117.300	Kepala Bidang Perumahan Permukiman						

Padang Panjang, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

